

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Renita Wulandari

Nomor Mahasiswa : 14313163

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**YOGYAKARTA**

**2018**

## **SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi, pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Renita Wulandari

No. Mahasiswa : 14313163

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

**2018**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 9 April 2018

Penulis,



Renita Wulandari

## PENGESAHAN

### ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama : Renita Wulandari

Nomor Mahasiswa : 14313163

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 9 April 2018



Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

Heri Sudarsono, SE, M. EC

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Disusun Oleh : **RENITA WULANDARI**

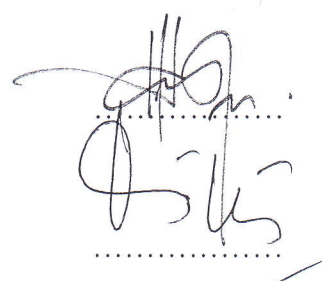
Nomor Mahasiswa : **14313163**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 14 Mei 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Heri Sudarsono, SE.,MEc

Penguji : Diana Wijayanti, Dra., M.Si.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

## MOTTO

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan maka apabila kamu sudah selesai dalam suatu urusan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.*

*(Q.S. Al-Insyiroh: 6-8)*

جَدِّ وَ جَدِّ مَنْ

*“Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti akan Mendapatkan Hasil”*

## PERSEMBAHAN

*Dengan kerendahan dan keikhlasan hati serta penuh kebanggaan, karya ini kupersembahkan untuk keluarga besar saya, khususnya kedua Orang Tua yang selalu menjadi motivasi terbesar dalam hidup dan sudah bekerja keras untuk dapat memenuhi keinginan saya menempuh pendidikan jauh dari nya. Kakak dan adikku yang selalu memberikan dukungan. Sahabat-sahabatku yang selalu ada memberikan semangatnya untukku. Almamaterku.*

*“SARJANA EKONOMI”*

*FAKULTAS EKONOMI*

*UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA*

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam serta junjungan besar kami Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ”**

Sejalan dengan terselesaikannya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengungkapkan Terima Kaih Kepada:

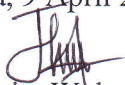
1. Allah SWT yang Maha Baik, Maha Penyayang dan Maha Penolong.
2. Kedua orang tua penulis yakni Bapak Sungkono dan Ibu Sulastri yang sudah bekerja keras dapat menyekolahkan penulis hingga kini mendapatkan gelar Sarjana. Terimakasih atas doa, semangat dan dukungan, serta kasih sayang yang telah diberikan dengan setulus hati. Semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah SWT. Amin.
3. Bapak Heri Sudarsono,SE.,M.Ec. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan bimbingan dengan baik.



4. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
5. Restu, terimakasih atas segala dukungan dan motivasinya selama ini.
6. Teruntuk Gesti, Yusuf, Tiyar, Rifqi, Agung, Marzuki terimakasih atas bantuan dan motivasinya selama ini sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
7. Teman-teman KKN unit 325 ( Mega, Ipung, Kindhy, Titis, Nina, Raras, Thawi, Reza). Terimakasih gengs atas 30 hari kebersamaan kita di satu atap yang sama. Susah dan senang telah kita lewati bersama. Hingga kini kalian semua dapat mengantarkan penulis meunju gerbang Sarjana atas terselesaikannya KKN ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya apabila terdapat kesalahan baik materi yang terdapat didalam tugas ini maupun penyelesaiannya, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tugas akhir ini (SKRIPSI) dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Yogyakarta, 9 April 2018

  
Renita Wulandari

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PENGESAHAN UJIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i> .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1..Latar Belakang.....	1
1.2..Rumusan Masalah.....	6
1.3..Tujuan Penelitian.....	6
1.4..Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1..Tinjauan Pustaka.....	8
2.1.1...Penelitian Terdahulu.....	8
2.2..Landasan Teori.....	11
2.2.1...Definisi Kemiskinan.....	11
2.2.2...Konsep Kemiskinan.....	14
1.. Kemiskinan Absolut.....	14
2.. Kemiskinan Relatif.....	14
3.. Kemiskinan Struktural.....	15

4.. Kemiskinan Kultural.....	15
2.2.3... Teori Lingkaran Setan Kemiskinan.....	16
2.2.4... Produk Domestik Regional Bruto.....	18
2.2.5... Indeks Pembangunan Manusia.....	18
2.2.6... Pengangguran.....	18
2.2.7... Belanja Daerah.....	21
2.2.8... Hubungan PDRB terhadap Kemiskinan.....	22
2.2.9... Hubungan IPM terhadap Kemiskinan.....	23
2.2.10. Hubungan Pengangguran terhadap Kemiskinan.....	23
2.2.11. Hubungan Belanja Daerah terhadap Kemiskinan.....	24
2.3.. Kerangka Penelitian.....	25
2.4.. Hipotesis Penelitian.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
3.1.. Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	27
3.2.. Populasi dan Sampel.....	27
3.3.. Devinisi Operasional Variabel.....	28
3.3.1... Variabel Dependen Y.....	28
3.3.2... Variabel Independen X1, X2, X3 dan X4.....	29
3.4.. Metode Analisis Data.....	30
3.5.. Alat Analisis Data.....	32
3.6.. Estimasi Regresi Data Panel.....	33
3.6.1... Common Effect atau Pooled Least Square (PLS).....	33
3.6.2... Fixed Effect Model (FEM).....	33
3.6.3... Random Effect Model (REM).....	34
3.7.. Penentuan Metode Estimasi Regresi Data Panel.....	34
3.7.1... Chow Test.....	34
3.7.2... Hausman Test.....	36
3.7.3... Uji Statistik (Uji T).....	36
3.7.4... Uji F.....	37

3.7.5...Keofisien Determinasi ( $R^2$ ).....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1..Deskripsi Data Penelitian.....	39
4.2..Analisis Statistik Deskriptif.....	39
4.2.1...Jumlah Penduduk Miskin.....	39
4.2.2...Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	41
4.2.3...Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	42
4.2.4...Perkembangan Pengangguran.....	43
4.2.5...Perkembangan Belanja Daerah.....	44
4.3..Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	45
4.4..Pemilihan Model Data Panel.....	46
4.4.1...Uji Chow (Likelihood Test Ratio).....	46
4.4.2...Uji Hausman.....	47
4.5..Pemilihan Model Data Panel.....	48
4.5.1...Uji Eksistensi Model (Uji F).....	50
4.5.2...Uji Validitas Pengaruh (Uji T) Fixed Effect Model.....	51
4.5.3...Interpretasi R-Squared ( $R^2$ ).....	53
4.6..Intepretasi Ekonomi.....	53
1....Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Miskin.....	53
2....Belanja Daerah dan Jumlah Penduduk Miskin.....	54
3....Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk Miskin.....	55
4....Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.1..Kesimpulan.....	59
5.2..Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1.... Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Wilayah Jawa Tahun 2010-2017.....	2
1.2.... Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2016.....	4
4.3.... Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	40
4.4.... Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2016.....	41
4.5.... Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2016.....	42
4.6.... Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2016.....	43
4.7.... Belanja Daerah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2016.....	44
4.8.... Hasil Regresi Data Panel.....	45
4.9.... Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Chow.....	46
4.10.. Hasil Estimasi Data Panel Dengan Uji Hausman.....	47
4.11.. Model Estimasi Fixed Effect Method.....	49
4.12.. Konstanta Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	49

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1.... Kerangka Penelitian.....	25

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran, belanja daerah terhadap jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fixed effect model (FEM) adalah model regresi data panel yang paling tepat. Berdasarkan uji validitas pengaruh, Indeks Pembangunan Manusia dan belanja daerah berpengaruh negative signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Sedangkan produk domestik regional bruto dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Berdasarkan uji F, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran dan belanja daerah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Hasil output regresi menunjukkan adjusted  $R^2$  sebesar 0,985666 atau 98,57% maka interpretasinya adalah 98,57% variasi variabel jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran dan belanja daerah. Sisanya sebesar 1,47% variasi variabel jumlah penduduk miskin dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam model.

**Kata kunci:** *produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, pengangguran, belanja daerah, jumlah penduduk miskin.*

## **ABSTRACT**

*This research entitled "Analysis of the Factors that Influence the Poverty of Daerah Istimewa Yogyakarta". The objective is to analyze the influence of gross regional domestic product, human development index, shopping areas and unemployment against a population of poor in regency/city Yogyakarta special region. This study uses secondary data with regression analysis techniques to the data panel.*

*The results showed that the fixed effect model (FEM) is a panel data regression model is most appropriate. Based on a test of the validity of influence or test t, human development index and a negative effect shopping area significantly to the population of poor, while the gross regional domestic product and unemployment has no effect against a significant number of poor population. Based on the test F, gross regional domestic product, human development index, shopping areas and unemployment simultaneously or together have an effect on the number of poor population.*

*The results of the regression output show the adjusted R<sup>2</sup> of 0.985666 or 98.57%, then the interpretation is a 98.57% variation variable the number of poor population can be explained by the variable gross regional domestic product (GDP), the human development index (HDI), shopping area and unemployment, and the rest of 1.47% variation variable the number of poor population are described by other free variables not included in the model.*

**Keywords:** *gross regional domestic product, human development index, shopping areas, the unemployed, the number of poor population*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh semua Negara di dunia terutama Negara sedang berkembang. Masalah ini harus dihadapi secara serius dikarenakan permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Tingkat kemiskinan yang tinggi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu mencakup semua aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, pengangguran.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, oleh karena itu salah satu hal yang menjadi permasalahan yang ada di Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah (BPS). Besarnya ukuran standar hidup tersebut relatif menurut pendekatan mana yang digunakan. Badan pusat statistik (BPS) Indonesia salah satunya mendasarkan pada besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk kebutuhan minum dan makanan menggunakan patokan 2.100 kalori per hari, jika di bawah itu maka tergolong dalam penduduk miskin.

Indonesia telah memberi perhatian khusus terhadap pentingnya pengentasan kemiskinan. Dalam UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu kriteria masalah sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemiskinan juga

dijelaskan Perpres No.2 tahun 2015 tentang RPJMN, yaitu dalam misi RPJMN mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan salah satunya dengan menanggulangi kemiskinan. Hal ini dapat diartikan bahwa kemiskinan mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

Dalam lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1-1**

**Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Wilayah Jawa  
Tahun 2010-2017**

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	4.04	3.64	3.70	3.70	4.09	3.39	3.75	3.78
Jawa Barat	10.93	10.57	9.88	9.61	9.18	9.53	8.77	7.83
Banten	7.02	6.26	5.71	5.71	5.51	5.90	5.36	5.39
Jawa Tengah	16.11	16.21	14.98	14.98	13.58	13.58	13.01	12.23
Jawa Timur	13.87	13.85	13.08	13.08	12.28	12.34	11.85	11.20
Yogyakarta	15.63	16.21	15.88	15.88	14.55	14.91	13.10	12.36

*Sumber: BPS, 2018*

Berdasarkan tabel 1-1, dari keenam provinsi, provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi selama kurun waktu 2010-2017 adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan persentase jumlah penduduk

miskin sebesar 12,36% pada tahun 2017. Kemudian diikuti Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,23%, lalu Provinsi Jawa Timur sebesar 11,20%, Provinsi Jawa Barat sebesar 7.83% dan Provinsi Banten sebesar 5,39%. Sedangkan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah adalah DKI Jakarta dengan persentase penduduk miskin sebesar 3,78%.

Secara keseluruhan, selama periode 2010 sampai dengan 2017 tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi. Pada periode tahun 2010 sampai dengan 2017 persentase penduduk miskin mengalami tren penurunan. Persentase penduduk miskin dari tahun 2010-2017 turun sebesar 3,27% yaitu dari 15,63% pada tahun 2010 menjadi 12,36% pada tahun 2017.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih menghadapi masalah kemiskinan yang serius. Berdasarkan tabel 1-1, Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Pulau Jawa pada periode 2010-2017. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai masih buruk, hal tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan Nasional.

Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta hampir tersebar ke seluruh kabupaten/kota, hanya beberapa kabupaten/kota besar saja

yang tingkat kemiskinannya rendah. Di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2010-2017 jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1-2**  
**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**Tahun 2008-2016**  
**(Ribu jiwa)**

Kabupaten	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kulonprogo	97.92	89.9	90.06	92.76	93.21	86.5	84.67	88.13	84.34
Bantul	142.7	146.2	146.9	159.4	158.8	159.2	153.5	160.2	142.76
Gunung Kidul	173.5	163.5	148.7	157.9	157.8	152.4	148.4	155	139.1
Sleman	116.7	116.6	117.2	117.3	118	111	110	110.9	96.6
Yogyakarta	41.7	45.3	37.8	37.7	37.4	35.6	35.6	36	32.06

*Sumber: BPS, 2017*

Berdasarkan tabel 1-2, jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurun waktu 2008-2016 mengalami fluktuasi. Namun secara keseluruhan jumlah penduduk miskin cenderung menurun. Dari kelima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2016 adalah Kabupaten Bantul dengan jumlah penduduk miskin sebesar 142.760 jiwa, kemudian diikuti

Kabupaten Gunung Kidul sebesar 139.100 jiwa, lalu Kabupaten Sleman dengan jumlah penduduk miskin sebesar 96.600 jiwa, Kabupaten Kulon Progo sebesar 84.340 jiwa. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terendah yakni Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk miskin sebesar 32.060 jiwa. Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, pemerintah perlu mengetahui dan memahami terlebih dahulu faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kemiskinan, agar langkah dalam mengambil kebijakan tepat sehingga mampu menyelesaikan pada akar masalah.

Tingginya persentase penduduk miskin selama periode 2008-2018 di Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengangguran. Arsyad (1997) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Untuk mengurangi kemiskinan, diperlukan peningkatan jumlah lowongan pekerjaan sehingga jumlah pengangguran dapat menurun. Dengan meningkatnya jumlah lowongan pekerjaan, pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan

Rendahnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diperoleh tiap-tiap kabupaten/kota, rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi produktivitas kerja rendah akan berakibat pula pada rendahnya

perolehan pendapatan yang tercermin dalam indeks pembangunan manusia. Serta rendahnya belanja daerah untuk fungsi pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2016”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, mengenai kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya:

1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menentukan kebijakan guna mengentaskan angka kemiskinan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat
2. Dapat memberi masukan bagi Bappeda dan BPS sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan.
3. Sebagai referensi penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan kemiskinan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Penelitian Terdahulu

Abdul (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Sragen tahun 1996-2015”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan sedangkan variabel independenya ialah *PDRB*, *pengangguran*, *inflasi*. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan baik secara deskriptif maupun statistik dengan regresi linear berganda yaitu menunjukkan bahwa variabel *PDRB*, *pengangguran* dan *inflasi* berpengaruh terhadap variabel tingkat kemiskinan.

Penelitian Puspita (2015) yang berjudul ”Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kemiskinan di provinsi Jawa Tengah periode 2008 sampai 2012. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan di antaranya yaitu *jumlah penduduk miskin*, *banyaknya pengangguran*, *Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)* dan *Angka Melek Huruf* dan semua variabel tadi dipilih periode 2008 sampai 2012. Metode penelitian yang



digunakan yaitu metode regresi data panel. Dalam penelitian ini pula ditemukan bahwa pengaruh pengangguran, PDRB dan jumlah atau populasi penduduk Jawa Tengah signifikan. Artinya berpengaruh pada kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian Leasiwal (2013) tentang "Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku". Periode waktu penelitian antara tahun 2005 hingga 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan pada Provinsi Maluku didominasi oleh penduduk di Pedesaan. Ada 6 (enam) variabel independen yang digunakan yakni *Daya Beli Masyarakat, Inflasi, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek huruf, Angka Partisipasi Kasar, Angka Harapan Hidup serta Jumlah Sekolah Menengah Atas*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diantara keenam variabel tersebut hanya variabel Angka Harapan Hidup yang signifikan.

Penelitian Cholili & Pudjihardjo (2014) tentang "Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia)". Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana tiga variabel independen berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia, dengan variabel independen adalah *Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pengangguran* baik secara simultan maupun secara parsial. Hasil penelitian memperlihatkan adanya pengaruh

secara simultan dari ketiga variabel independen, namun ketika diuji secara parsial PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan IPM dan pengangguran secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Rahmaniar (2014)) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, Belanja Daerah Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1996-2014”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel independen *pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran, dan inflasi* terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Namun pada variabel pendidikan dan inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel pengangguran memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Nisa (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2002–2013”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen *pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pendidikan, konsumsi rumahtangga, tabungan (saving) rumahtangga* terhadap variabel dependen kemiskinan Kota Bogor. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

kemiskinan. Sedangkan pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Untuk pengangguran dan tabungan rumahtangga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya, konsumsi rumahtangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Wayan (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Struktur Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen *PDRB, pendidikan dan struktur tenaga kerja pertanian* terhadap variabel dependen tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Hasil analisis berdasarkan 4 variabel menunjukkan adanya pengaruh secara simultan PDRB, pendidikan dan struktur tenaga kerja pertanian terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Uji t menunjukkan terdapat pengaruh negative namun signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali, sedangkan struktur tenaga kerja pertanian secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Definisi Kemiskinan**

Secara etimologis “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen sosial dan Badan Pusat statistik mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan

dasar. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal hidup layak (BPS, 2002).

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kemiskinan berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan (*inequality*). Perbedaan ini sangat perlu ditekankan. Kemiskinan berkaitan erat dengan standar hidup yang absolut dari bagian masyarakat tertentu, sedangkan ketimpangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Pada tingkat ketimpangan yang ekstrim, kekayaan yang dimiliki oleh satu orang saja, dan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi (Kuncoro, 2010).

Selain itu kemiskinan sering dipahami dengan rendahnya tingkat kesejahteraan semata, tetapi kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensi. Artinya, kemiskinan berkaitan satu sama lain dengan berbagai macam dimensi kebutuhan manusia (Todaro, 2006). Hal tersebut dikarenakan kebutuhan manusia bermacam-macam, maka kemiskinan memiliki banyak aspek. Kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi politik, dan pengetahuan serta ketrampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat,

perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyad, 2015).

World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Ini termasuk berpenghasilan rendah dan ketidakmampuan untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, dan kapasitas memadai serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik (Kumalasari, 2011).

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*).

### **2.2.2 Konsep Kemiskinan**

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 konsep dasar. Adapun keempat konsep kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

#### **1. Kemiskinan Absolut**

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara baik. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Arsyad, 1992).

#### **2. Kemiskinan Relatif**

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “tidak miskin”. Ada ahli yang berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat

kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Konsep kemiskinan relative bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada (Arsyad, 1992).

### **3. Kemiskinan Struktural**

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai disebabkan kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan karena tatanan itu tidak hanya menyebabkan kemiskinan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Kemiskinan menggejala karena tatanan sosial yang tidak adil yang menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang atau akses untuk mengembangkan dirinya serta kualitas hidupnya sehingga mereka menjadi serba kekurangan (Badrudin, 2012).

### **4. Kemiskinan Kultural**

Kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. padahal indikator kemiskinan tersebut dapat dikurangi atau bahkan secara bertahap dapat dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. (Badrudin, 2012).

Konsepsi kemiskinan yang bersifat multidimensional ini kiranya lebih tepat, jika digunakan sebagai pisau analisis dalam mendefinisikan kemiskinan dan merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan di Indonesia.

### **2.2.3 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan**

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran kemiskinan didefinisikan sebagai suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan suatu kondisi di mana sebuah negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dst. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Rukse, ekonom pembangunan ternama di tahun 1953, yang mengatakan “*A poor country is poor because it is poor*” (Negara miskin itu karena dia miskin).

Konsep lingkaran setan kemiskinan (*viricious circle of poverty*) yang dikemukakan oleh Baldwin dan Meier, menunjukkan bahwa semakin kurang berkembangnya kondisi sosial dan ekonomi suatu negara, semakin terbatas



pula jumlah sumberdaya dan kekayaan alam yang sudah dimanfaatkan dengan penuh. Kekayaan alam belumlah sepenuhnya diusahakan dan dikembangkan karena tiga alasan yaitu: (1) Tingkat pendidikan masyarakatnya masih relative rendah, (2) Kurangnya tenaga ahli yang diperlukan serta, (3) Terbatasnya mobilitas dari sumberdaya yang ada.

Menurut Nurkse ada dua lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari sisi penawaran (*supply*) dimana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan untuk menabung yang rendah menyebabkan tingkat pembentukan modal rendah, tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dan dengan demikian tingkat produktivitasnya juga rendah dan seterusnya.

Dari sisi permintaan (*demand*), di negara-negara miskin kemampuan untuk menanam modal sangat rendah, hal ini dikarenakan luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas yang disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang sangat rendah. Rendahnya pendapatan masyarakat dikarenakan tingkat produktivitasnya yang rendah, sebagai wujud dari tingkat pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan kurangnya perangsang untuk menanamkan modal dan seterusnya (Jhingan, 2010).

#### **2.2.4 Produk Domestik Regional Bruto**

Menurut Badan Pusat Statistik (2012), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh input ekonomi di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Besar kecilnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu besarnya Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan sangat tergantung kepada potensi sumber daya alam dan factor-faktor produksi yang dimiliki oleh suatu daerah. Adanya keterbatasan dalam menyediakan factor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah (Sukirno, 2000).

#### **2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah alat ukur capaian pembangunan manusia yang berbasis pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang berdasarkan pada tingkat kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Indikator IPM dengan metode baru berdasarkan BPS (2015) merupakan gabungan dari tiga indeks, yaitu :

- a. Indeks Kesehatan, yang diukur dengan angka harapan hidup (AHH).

AHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat

ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Dihitung dengan cara tidak langsung dengan *paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA)* atau *Mortpack*.

- b. Indeks Pendidikan, yaitu diukur dengan harapan lama sekolah (HLS) dan rata - rata lama sekolah (RLS). HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
- c. Indeks Pengeluaran, yaitu diukur dengan pengeluaran per kapita disesuaikan. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten dan kota. Rata-rata pengeluaran per kapita konstan kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*). Pengeluaran yang telah dibagi ini disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

#### **2.2.6 Pengangguran**

Pengangguran adalah seseorang yang sudah di golongan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 2004).

Oleh sebab itu, menurut Sukirno (2004) pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya:

a. Pengangguran Friksional

Suatu jenis pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya.

b. Pengangguran Struktural

Pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian. Pengangguran ini disebabkan adanya pertumbuhan ekonomi ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Keadaan pendapatan menyebabkan para pengangur harus mengurangi pengeluaran konsumsimnya. Apabila kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Sukirno, 2004).

c. Pengangguran Konjungtur

Pengangguran ini Pada umumnya berlaku sebagai akibat dari penurunan permintaan agregat yang mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar. Sehingga muncul pengangguran konjungtur.

### **2.2.7 Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang pembayarannya tidak akan diperoleh kembali oleh daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah berdasarkan sifatnya dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung dapat dikelompokkan seperti: Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, dan Belanja modal

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung menurut jenis belanja terdiri dari: Belanja pegawai, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa

### **2.2.8 Hubungan PDRB terhadap Kemiskinan**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi dasar dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi maka merepresentasikan distribusi pendapatan kepada rumah tangga faktor produksi mengalami perbaikan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan gambaran terhadap kesejahteraan faktor produksi, dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi produktivitas faktor produksi dan semakin tinggi upah yang diterima para pekerja. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin (Ramdani, 2015).

Penurunan kemiskinan di Indonesia dapat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti investasi melalui penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh swasta dan pemerintah, perkembangan teknologi yang semakin inovatif dan produktif, serta pertumbuhan penduduk melalui peningkatan modal manusia (Boediono, 2001).

### **2.2.9 Hubungan IPM terhadap Kemiskinan**

Kualitas sumber daya manusia yang baik menjadi syarat mutlak dalam pembangunan. Ketika nilai IPM tinggi berarti kualitas sumber daya manusia di suatu daerah baik, sehingga masyarakat yang berada di dalamnya memiliki produktivitas yang tinggi. Produktivitas yang tinggi akan memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat yang kemudian menjauhkannya dari kemiskinan.

Pada kenyataannya dapat dilihat bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan akan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan seseorang, sehingga dapat mendorong produktivitas seseorang menjadi lebih tinggi. Perusahaan yang mempekerjakan orang yang memiliki produktivitas tinggi akan memperoleh hasil yang lebih banyak, sehingga perusahaan bersedia memberikan upah atau gaji yang lebih tinggi. Dengan peningkatan pendapatan, maka dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan tingkat konsumsinya. Sehingga orang tersebut dapat lepas dari lingkaran kemiskinan (Dedy, 2014).

### **2.2.10 Hubungan Pengangguran terhadap Kemiskinan**

Jumlah pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan di Indonesia, bagi penduduk yang memiliki ketergantungan sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk

membeli kebutuhan sehari-hari. Yang artinya bahwa semakin tinggi pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan.

Efek buruk dari pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan (Sukirno, 2004).

#### **2.2.11 Hubungan Belanja Daerah terhadap Kemiskinan**

Peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sangat dibutuhkan, sesuai dengan peranan pemerintah yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Peranan tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi jika tujuan pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan ingin terselesaikan. Anggaran yang dikeluarkan melalui belanja untuk pengentasan kemiskinan menjadi stimulus dalam menurunkan angka kemiskinan dan beberapa persoalan pembangunan yang lain (Azwar, 2016).

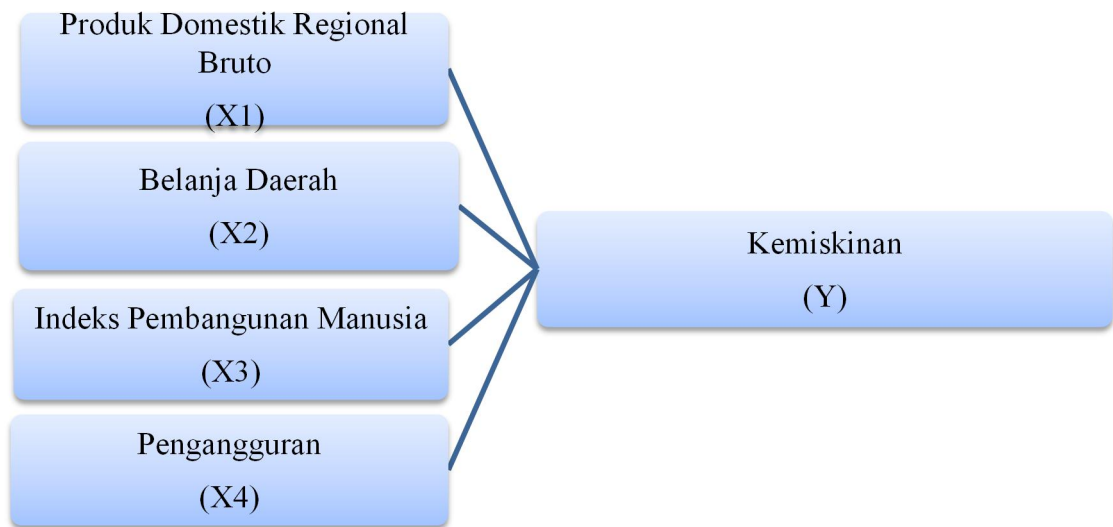
Dengan menentukan sasaran belanja yang tepat, pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan. Pertama, belanja pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kedua, belanja pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki



indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan.

### 2.3 Kerangka Penelitian

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini adalah gambaran dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



**Gambar 2.1**

### **Kerangka Penelitian**

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah dan landasan teori, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi DIY.
2. Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi DIY.
3. Diduga Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi DIY.
4. Diduga Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi DIY.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2012), data sekunder adalah data yang keberadaanya tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti tetapi diperoleh dari sumber terseleksi baik dari buku, maupun laporan-laporan penelitian serta instansi atau lembaga pemerintahan yang mempunyai data-data menunjang di dalam penelitian.

Data yang digunakan meliputi data jumlah penduduk miskin, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Daerah, dan pengangguran yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta. Data *time series* dalam penelitian ini ada 6 tahun ( $t=6$ ) yaitu dari tahun 2008 sampai tahun 2016, dan data *cross section* dalam penelitian ini ada 5 daerah ( $n=5$ ), sehingga total data dalam penelitian ini adalah  $5 \times 9 = 45$ .

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Wilayah yang dijadikan objek dalam penelitian ini terdiri dari 5 Kabupaten-Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Kabupaten

Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta pada tahun 2008-2016. Sedangkan untuk objek penelitian ini adalah kemiskinan, peneliti bermaksud untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan belanja daerah pengangguran terhadap kemiskinan di wilayah tersebut.

### **3.3 Devinisi Operasional Variabel**

Pada penelitian ini menggunakan 5 variabel yang akan diteliti, variabel tersebut terdiri dari jumlah penduduk miskin, PDRB, IPM, pengangguran dan belanja daerah. Berikut definisi operasional dari masing-masing variabel

#### **3.3.1 Variabel Dependen Y**

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas menurut Sugiyono (2014). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin didefinisikan dengan banyaknya penduduk atau orang yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2016 yang dinyatakan dalam satuan juta jiwa per tahun.

### **3.3.2 Variabel Independen X1, X2, X3 dan X4**

Variabel Independen merupakan variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (Variabel terikat) Sugiyono (2014). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Produk Domestik Regional Bruto, adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan disetiap Kabupaten/Kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dari seluruh sektor dan kegiatan perekonomian dengan menggunakan harga berlaku dari tahun 2008-2016 yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah.
2. Indeks Pembangunan Manusia, merupakan indikator komposit dari gabungan 3 (tiga) indikator yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan pengeluaran per kapita yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah (Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2016) yang dinyatakan dalam satuan persen.
3. Pengangguran, merupakan tingkat pengangguran terbuka dimana penduduk yang sudah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha dan sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja di masing-masing Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2016 yang dinyatakan dalam satuan persen.

4. Belanja Daerah, berupa total belanja daerah yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Belanja pemerintah berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2016 yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah.

### 3.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, belanja daerah dan pengangguran terhadap kemiskinan adalah regresi data panel. Aplikasi pengolahan dalam penelitian ini menggunakan program E-views. Data panel merupakan gabungan antara deret waktu (*time series*) dengan deret kerat lintang (*cross section*), yang berarti data yang diperoleh dari data cross section yang diobservasi berulang pada unit objek yang sama pada waktu yang berbeda (Juanda, 2012).

Data panel adalah kombinasi antara data runtut waktu, yang unit analisisnya memiliki observasi temporal biasa, dengan menggunakan data silang tempat, yang memiliki observasi-observasi pada suatu unit analisis pada titik waktu tertentu, (Kuncoro, 2011).

Regresi panel merupakan sekumpulan teknik untuk memodelkan pengaruh perubah penjelas terhadap perubah respon pada data panel. Ada beberapa model regresi panel, salah satunya adalah model dengan *slope*

konstan dan *intercept* bervariasi. Model regresi panel yang hanya dipengaruhi oleh salah satu unit saja (unit *cross-sectional* atau unit waktu) disebut model komponen satu arah, sedangkan model regresi panel yang dipengaruhi oleh kedua unit (unit *cross-sectional* dan unit waktu) yang disebut model komponen dua arah. Secara umum terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam menduga model dari data panel yaitu model tanpa pengaruh individu (*common effect*) dan model dengan pengaruh individu (*fixed effect* dan *random effect*).

(Gujarati, 2012) berpendapat bahwa kelebihan penggunaan data panel dari *cross section* atau *time series* adalah :

1. Panel data terkait pada individu, perusahaan, wilayah, negara dan lainlain, dari waktu ke waktu, terdapat batas heterogenitas dalam setiap unitnya. Maka digunakan teknik estimasi panel yang dapat mengatasi heterogenitas tersebut secara eksplisit dengan memberiakan variabel spesifik subjek.
2. Kombinasi antar observasi *time series* dan *cross section*, data panel dapat memberikan lebih data yang informatif, bervariasi dan kolinieritas yang lebih kecil diantara variabel-variabel serta lebih efisien dan banyak *degree of freedom*.
3. Data panel lebih cocok dalam mempelajari dinamika suatu perubahan karena observasi *cross section* yang berulang-ulang.

4. Penggunaan data panel yang paling baik adalah mendeteksi dan mengukur dampak yang sederhana tapi tidak dapat dilihat pada *cross section murni* atau *time series* yang murni.
5. Data panel dapat berguna untuk mempermudah dan mempelajari model perilaku yang rumit.
6. Dengan membuat data menjadi berjumlah ribuan unit.

### 3.5 Alat Analisis Data

Alat analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebuah software yaitu *Eviews*,<sup>8</sup> *Eviews* merupakan program atau software yang dapat digunakan untuk mengolah data statistik dan data ekonometri, Program ini tersedia dalam versi *MS Windows* dan *Macintosh*, Adapun model yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	: Jumlah penduduk miskin
X <sub>1</sub>	: Produk Domestik Regional Bruto ( Miliar rupiah )
X <sub>2</sub>	: Indeks Pembangunan Manusia ( % )
X <sub>3</sub>	: Tingkat Pengangguran Terbuka ( % )
X <sub>4</sub>	: Belanja daerah (juta rupiah)
β <sub>0</sub>	: Intercep
β <sub>1</sub> , β <sub>2</sub> , β <sub>3</sub> , β <sub>4</sub>	: koefesian regresi variabel independen
e	: komponen error



### **3.6 Estimasi Regresi Data Panel**

Pengujian hipotesis estimasi dalam penelitian ini meliputi pengujian secara Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect :

#### **3.6.1 Common Effect atau Pooled Least Square (PLS)**

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

#### **3.6.2 Fixed Effect Model (FEM)**

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepanya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effects* menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

### 3.6.3 Random Effect Model (REM)

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yaitu dapat menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

## 3.7 Penentuan Metode Estimasi Regresi Data Panel

Untuk memilih model yang paling tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yaitu dapat digunakan *chow test* dan *hausman test*. Dimana *chow test* digunakan untuk menguji kesesuaian data yang didapat dari *pooled least square* dan data yang didapatkan dari metode *fixed effect*. Kemudian dilakukan *hausman test* untuk dipilih model yang paling tepat yang diperoleh dari hasil *chow test* dan metode *random effect*.

### 3.7.1 Chow Test

Chow test (Uji Chow) yakni pengujian untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah :

H0 : *Common Effect Model* atau *pooled OLS*

H1 : *Fixed Effect Model*

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F tabel maka H0 ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil (<) dari F table maka H0 diterima dan model yang digunakan adalah *Common Effect Model* (Widarjono, 2009). Perhitungan F statistik didapat dari Uji Chow dengan rumus (Baltagi, 2005):

$$F = \frac{\frac{(SSE_1 - SSE_2)}{(n - 1)}}{\frac{SSE_2}{(nt - n - k)}}$$

Keterangan:

SSE1 : Sum Square Error dari model *Common Effect*

SSE2 : Sum Square Error dari model *Fixed Effect*

n : Jumlah perusahaan (*cross section*)

nt : Jumlah *cross section* x jumlah *time series*

k : Jumlah variabel independent

### 3.7.2 Hausman Test

Pengujian ini membandingkan model *fixed effect* dengan *random effect* dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel (Gujarati, 2012). Hausman *test* menggunakan program yang serupa dengan Chow *test* yaitu program *Eviews*. Hipotesis yang dibentuk dalam Hausman *test* adalah sebagai berikut :

$H_0$  : Model *Random Effect*

$H_1$  : Model *Fixed Effect*

$H_0$  ditolak jika *P-value* lebih kecil dari nilai  $\alpha$ . Sebaliknya,  $H_0$  diterima jika *P-value* lebih besar dari nilai  $\alpha$ . Nilai  $\alpha$  yang digunakan sebesar 5%.

### 3.7.3 Uji Statistik (Uji T)

Uji T pada dasarnya dilakukan untuk melihat apakah nilai rata-rata suatu distribusi nilai (kelompok) berbeda secara nyata (signifikan) terhadap nilai rata-rata dari distribusi nilai (kelompok) lainnya. Uji T ini juga dapat melihat dua nilai beda koefisien nilai korelasi.

Untuk melakukan Uji T maka dapat digunakan dengan rumus berikut:

$$t = \beta_n / S\beta_n$$

Keterangan :

$t$  : mengikuti fungsi  $t$  dengan derajat kebebasan (df).

$\beta_n$  : koefisien regresi masing-masing variabel.

$S\beta_n$  : standar error masing-masing variabel.

Dasar Pengambilan Keputusan:

Jika probabilitas (signifikansi)  $> 0,05$  ( $\alpha$ ) atau  $T$  hitung  $< T$  tabel berarti hipotesa tidak terbukti maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak, bila dilakukan uji secara parsial. Jika probabilitas (signifikansi)  $< 0,05$  ( $\alpha$ ) atau  $T$  hitung  $> T$  tabel berarti hipotesa terbukti maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, bila dilakukan uji secara parsial.

#### 3.7.4 Uji F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2011). Menurut Utomo (2013) langkah-langkah ringkas uji statistik F adalah sebagai berikut:

a) Formulasi Hipotesis

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$  ; model yang dipakai tidak eksis

$H_A : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \neq \beta_n \neq 0$  ; model yang dipakai eksis

b) Menentukan tingkat signifikansi ( $\alpha$ )

c) Kriteria Pengujian

$H_0$  ditolak jika signifikansi statistik  $F < \alpha$

$H_0$  diterima jika signifikansi statistik  $F > \alpha$

d) Kesimpulan

Jika nilai F probabilitas  $> \alpha$ , maka  $H_0$  diterima artinya tidak ada pengaruh dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan apabila nilai F probabilitas  $< \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak artinya ada pengaruh dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

### 3.7.5 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model (Kuncoro, 2011). Dengan kata lain koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*).

Nilai  $R^2$  yang sempurna adalah 1, yaitu apabila gambaran keseluruhan variasi variabel dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen dalam model, sehingga kesimpulannya adalah:

- a. Nilai  $R^2$  yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat lemah. Nilai  $R^2$  mendekati satu, berarti kemampuan variabel independen dalam model mampu menjelaskan hampir semua variasi variabel dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Data Penelitian**

Bab ini membahas hasil analisis data yang menjadi tujuan dalam penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, pada bagian ini pembahasan hasil penelitian terdiri dari dua bagian yaitu pembahasan tentang deskripsi dan pembahasan hasil estimasi data panel tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2016.

#### **4.2 Analisis Statistik Deskriptif**

##### **4.2.1 Jumlah Penduduk Miskin**

Berikut ini merupakan perkembangan jumlah penduduk miskin Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2008-2016.

**Tabel 4-3**  
**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**Tahun 2008-2016**

Kabupaten	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kulonprogo	97.92	89.9	90.06	92.76	93.21	86.5	84.67	88.13	84.34
Bantul	142.7	146.2	146.9	159.4	158.8	159.2	153.5	160.2	142.76
Gunung Kidul	173.5	163.5	148.7	157.9	157.8	152.4	148.4	155	139.1
Sleman	116.7	116.6	117.2	117.3	118	111	110	110.9	96.6
Yogyakarta	41.7	45.3	37.8	37.7	37.4	35.6	35.6	36	32.06

*Sumber: BPS, 2017*

Berdasarkan tabel 4-1 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2008-2016 yang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin paling banyak adalah kabupaten Bantul yaitu sebesar 142.760 ribu jiwa, kemudian diikuti kabupaten Gunung Kidul pada urutan kedua sebesar 139.100 ribu jiwa, dan urutan ketiga yaitu kabupaten Sleman sebesar 96.600 ribu jiwa. Sedangkan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit terdapat di kota Yogyakarta sebesar 32.060 ribu jiwa dan diikuti kabupaten Kulon Progo sebesar 84.340 ribu jiwa.



#### 4.2.2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berikut ini merupakan data perkembangan Produk domestik regional bruto (PDRB) di Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurun waktu 2008-2016.

**Tabel 4-4**

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tahun 2008-2016  
(Miliar Rupiah)**

Kabupaten	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kulonprogo	4.73	4.90	5.03	5.25	5.48	5.74	5.99	6.28	6.58
Bantul	11.36	11.70	12.11	12.73	13.41	14.14	14.85	15.59	16.38
Gunung Kidul	8.16	8.49	8.85	9.38	10.55	11.53	10.64	11.15	11.70
Sleman	19.60	20.91	21.48	22.65	23.96	25.37	26.71	28.10	29.57
Yogyakarta	16.05	16.61	17.20	18.21	19.19	20.24	21.31	22.39	23.54

*Sumber: BPS, 2017*

Pada tabel 4-2 menunjukkan nilai PDRB Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2008-2016 mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2016 nilai PDRB tertinggi dimiliki oleh kabupaten Sleman yaitu sebesar 29.57 miliar rupiah. Kemudian kota

Yogyakarta sebesar 23.54 miliar rupiah, lalu kabupaten Bantul sebesar 16.38 miliar rupiah.

Sedangkan kabupaten dengan nilai PDRB terendah yakni kabupaten Kulon Progo dengan PDRB 6.58 miliar rupiah, diikuti kabupaten Gunung Kidul sebesar 11.70 miliar rupiah.

#### 4.2.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berikut ini merupakan data perkembangan Indeks pembangunan manusia (IPM) selama kurun waktu 2008-2016.

**Tabel 4- 5**

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2016 (Persen)**

Kabupaten	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kulonprogo	67.52	67.94	68.83	69.53	69.74	70.14	70.68	71.52	72.38
Bantul	74.18	75.26	75.31	75.79	76.13	76.78	77.11	77.99	78.42
Gunung Kidul	63.41	63.74	64.2	64.83	65.69	66.31	67.03	67.41	67.82
Sleman	77.24	77.7	79.69	80.04	80.1	80.26	80.73	81.2	82.15
Yogyakarta	80.24	79.89	82.72	82.98	83.29	83.61	83.78	84.56	85.32

*Sumber: BPS, 2017*

Pada tabel 4-3 menunjukkan nilai Indeks Pembangunan Manusia selama tahun 2008-2016 mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2016 nilai IPM tertinggi dimiliki oleh kota Yogyakarta yaitu sebesar

85.32%. Kemudian kabupaten Sleman sebesar 82.15%, lalu kabupaten Bantul sebesar 78.42%. Sedangkan kabupaten dengan nilai IPM terendah yakni kabupaten Gunung Kidul dengan IPM 67.82%, diikuti kabupaten Kulon Progo sebesar 72.38%.

#### 4.2.4 Perkembangan Pengangguran

Berikut ini merupakan data perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurun waktu 2008-2016.

**Tabel 4-6**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di**  
**Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**Tahun 2008-2016**  
**(Persen)**

Kabupaten	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kulonprogo	3.56	4.31	4.18	2.56	3.04	2.85	2.88	3.72	1.99
Bantul	5.06	5.85	5.24	3.80	3.70	3.36	2.57	3.00	3.12
Gunung Kidul	3.29	3.94	4.04	1.97	1.38	1.69	1.61	2.90	1.68
Sleman	6.83	7.43	7.17	5.25	5.64	3.28	4.21	5.37	3.51
Yogyakarta	7.85	8.07	7.41	5.57	5.33	6.45	6.35	5.52	5.08

*Sumber: BPS, 2017*

Dari tabel 4-4 menunjukkan perkembangan pengangguran yang dapat dilihat melalui jumlah pengangguran terbuka selama kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 wilayah dengan jumlah pengangguran terbuka tertinggi adalah kota Yogyakarta yaitu sebesar

5.08%, kemudian diikuti kabupaten Sleman sebesar 3.51%, lalu Kabupaten Bantul sebesar 3.12%. Sedangkan wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka terendah adalah kabupaten Gunung Kidul sebesar 1.68% dan diikuti kabupaten Kulonprogo sebesar 1.99%.

#### 4.2.5 Perkembangan Belanja Daerah

Berikut ini merupakan data perkembangan belanja daerah selama periode tahun 2008-2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Tabel 4-7**

**Belanja Daerah Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2016  
(Miliar Rupiah)**

Kabupaten	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kulonprogo	581.9	602.9	612.9	780.6	881.7	964.6	1.060	1.243	1.252
Bantul	1.047	921.7	1.012	1.151	1.282	1.387	1.700	1.933	2.173
Gunung Kidul	688.5	694.2	765.2	938.9	1.073	1.180	1.267	1.586	1.748
Sleman	752.1	906.6	1.108	1.278	1.421	1.693	1.896	2.328	2.615
Yogyakarta	569.3	698.6	839.9	932.0	1.023	1.232	1.336	1.539	1.888

*Sumber: BPS, 2017*

Dari tabel 4-5 menunjukkan nilai belanja daerah selama tahun 2008-2016 yang mengalami perkembangan signifikan. Pada tahun 2016 jumlah belanja daerah tertinggi dimiliki oleh kabupaten Sleman yaitu sebesar 2.615 triliun rupiah. Kemudian kabupaten Bantul sebesar 2.173 triliun rupiah, lalu

Kota Yogyakarta sebesar 1.888 triliun rupiah. Sedangkan kabupaten dengan nilai belanja daerah terendah yakni kabupaten Kulonprogo dengan belanja daerah sebesar 1.252 triliun rupiah, diikuti Kabupaten Gunung Kidul sebesar 1.748 triliun rupiah.

#### 4.3 Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Hasil estimasi regresi data panel dengan tiga metode yaitu Pooled Ordinary Least Square, Fixed Effect Model, Random Effect Model dapat dilihat pada berikut.

**Tabel 4-8**

**Hasil Regresi Data Panel**

Variabel	Keofisien Model		
	PLS	FEM	REM
C	567.8608	240.5689	567.8608
PDRB	2.255353	-0.484237	2.255353
IPM	-7.050148	-1.614864	-7.050148
PGR	1.568599	-0.075269	1.568599
Belanja Daerah	0.075264	-0.012803	0.075264
F.Statistic	84.99925	1856.581	84.99925
R2	0.607141	0.985666	0.607141
Prob F.Stat	0	0	0

*Sumber: Olah data panel menggunakan E-views9 (Lihat lampiran)*

#### 4.4 Pemilihan Model Data Panel

Untuk memilih model yang terbaik antara metode Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect menggunakan uji Chow dan uji Hausman.

#### 4.4.1 Uji Chow (Likelihood Test Ratio)

Uji Chow merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat apakah model FEM lebih baik dibandingkan dengan model PLS. Hasil pengolahan uji chow dapat dilihat pada Tabel 4-9.

**Tabel 4-9**

**Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1421.964403	(4,216)	0.0000
Cross-section Chi-square	744.927585	4	0.0000

*Sumber: Output data panel menggunakan E-views9 (Lihat lampiran)*

- a. Formulasi hipotesis

$H_0$  : model Pooled Least Square/PLS

$H_A$ : model Fixed Effect Method/FEM

- b. Menentukan tingkat signifikansi

$$\alpha = 0,05$$

- c. Menentukan kriteria pengujian

$H_0$  diterima bila p-value  $> 0,05$

$H_A$  diterima bila p-value  $< 0,05$

d. Simpulan

Nilai p-value atau probabilitas F test sebesar  $0.0000 < 0.05$  dan Chi-Square sebesar  $0.0000 < 0.05$  sehingga  $H_0$  ditolak maka model mengikuti Fixed Effect.

#### 4.4.2 Uji Hausman

Uji hausman merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat apakah model FEM lebih baik daripada model REM. Hasil pengolahan uji hausman dapat dilihat pada Tabel 4-8

**Tabel 4-10**

**Hasil Estimasi Data Panel Dengan Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5703.857612	4	0.0000

*Sumber: Output data panel menggunakan E-views9 (Lihat lampiran)*

a. Formulasi hipotesis

$H_0$  : model Random Effect Method/REM

$H_A$  : model Fixed Effect Method/FEM

b. Menentukan tingkat signifikansi

$\alpha = 0,05$

c. Menentukan kriteria pengujian

$H_0$  diterima bila  $p\text{-value} > \alpha$

$H_A$  diterima bila  $p\text{-value} < \alpha$

d. Simpulan

Nilai  $p\text{-value}$  atau probabilitas dari chi-Square statistic atau Cross Section random sebesar  $0.0000 < 0.05$ ,  $H_A$  diterima maka model mengikuti Fixed Effect Method. Berdasarkan hasil estimasi data panel untuk memilih model yang terbaik dengan uji chow dan uji hausman, maka terpilih model yang terbaik yaitu Fixed Effect Method.

#### **4.5 Pemilihan Model Data Panel**

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, maka model terbaik yang di pilih ialah model *fixed effect*, jadi hasil regresi akan di estimasi dengan beberapa uji adalah sebagai berikut uji kebaikan garis regresi ( $R^2$ ), uji kelayakan model (Uji F), dan (uji T).

Hasil estimasi metode Fixed Effect dapat dilihat pada Tabel 4-11



**Tabel 4-11**

**Model Estimasi Fixed Effect Method**

---

$$KM_{it} = 240.5689 - 0.0484237PDRB_{it} - 1.614864IPM_{it} - 0.075269PGR_{it} - 0.012803BelanjaDaerah_{it}$$

---

$R^2 = 0.985666$	F-statistic	1856.581	Prob(F-statistic)	0.000000
------------------	-------------	----------	-------------------	----------

---

Keterangan: Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai t-statistik.

\* signifikan pada  $\alpha = 0.05$

**Tabel 4-12**

**Konstanta Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

---

No	Kabupaten	Konstanta
1	Kulonprogo	206.89018
2	Bantul	286.44486
3	Gunung Kidul	268.19641
4	Sleman	257,81
5	Yogyakarta	183.50305

---

*Sumber: BPS diolah menggunakan E-views9*

Dari hasil analisis pada tabel 4-11 diperoleh bahwa secara umum variabel produk domestik regional bruto negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan koefisien regresi sebesar -0.0484237. Artinya apabila variabel produk domestik regional bruto naik sebesar 1 persen maka jumlah penduduk miskin akan mengalami penurunan sebesar 0.0484237 persen. Variabel belanja

daerah berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan koefisien regresi sebesar -0.012803. Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan koefisien regresi sebesar -1.614864. Artinya apabila variabel indeks pembangunan manusia naik sebesar 1 persen maka jumlah penduduk miskin akan mengalami kenaikan sebesar 1.614864 persen. Variabel pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari tabel 4-12 juga memperlihatkan variasi konstanta dari masing-masing daerah. Hal ini memperlihatkan dalam setiap daerah mengalami perubahan struktur regresi. Pada Kabupaten/Kota Bantul terlihat bahwa konstanta regresi kemiskinan adalah yang tertinggi, yakni 286.44486 artinya pada Kabupaten/Kota ini cenderung paling besar. Dan pada Kabupaten/Kota Yogyakarta terlihat konstanta regresi kemiskinan terendah, yakni 183.50305 artinya pada Kabupaten/Kota ini cenderung paling kecil.

#### **4.5.1 Uji Eksistensi Model (Uji F)**

Uji F digunakan untuk menguji eksistensi suatu model. Secara teoritis, langkah-langkah uji F dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Formulasi hipotesis

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , model yang dipakai tidak eksis

$H_A : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ , model yang dipakai eksis

b. Pemilihan tingkat signifikansi

$\alpha = 0,05$

c. Kriteria Pengujian

$H_0$  ditolak bila signifikansi statistik  $F \leq 0,05$

$H_0$  diterima bila signifikansi statistik  $F > 0,05$

d. Simpulan

Dari hasil estimasi, nilai signifikansi statistik F sebesar  $0.000000 < 0.05$ ,  $H_0$  ditolak maka model yang dipakai eksis. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Belanja Daerah dan pengangguran (PGR) yang terdapat dalam persamaan regresi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

#### **4.5.2 Uji Validitas Pengaruh (Uji T) Fixed Effect Model**

Uji koefisien regresi secara parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui signifikan dan tidaknya pengaruh variabel-variabel independen dalam model. Langkah-langkah uji t adalah sebagai berikut:

1. Formulasi Hipotesis

$H_0 : \beta_1 = 0$ , variabel PDRB tidak memiliki pengaruh signifikan

$H_A : \beta_1 \neq 0$ , variabel PDRB memiliki pengaruh signifikan

$H_0 : \beta_2 = 0$ , variabel IPM tidak memiliki pengaruh signifikan

$H_A : \beta_2 \neq 0$ , variabel IPM memiliki pengaruh signifikan

$H_0 : \beta_3 = 0$ , variabel PGR tidak memiliki pengaruh signifikan

$H_A : \beta_3 \neq 0$ , variabel PGR memiliki pengaruh signifikan

$H_0 : \beta_1 = 0$ , variabel Belanja Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan

$H_A : \beta_1 \neq 0$ , variabel Belanja Daerah memiliki pengaruh signifikan

2. Menentukan tingkat signifikansi

$$\alpha = 0.05$$

3. Menentukan kriteria pengujian

$H_0$  ditolak bila signifikansi statistik  $t_i \leq 0.05$

$H_0$  diterima bila signifikansi statistik  $t_i > 0.05$

4. Simpulan

- 1) Prob.  $t_{PDRB}$  sebesar  $0.1854 \geq 0.05$ ,  $H_0$  diterima maka variabel PDRB tidak memiliki signifikan.

- 2) Prob.  $t_{IPM}$  sebesar  $0.0003 \leq 0.05$ ,  $H_0$  ditolak maka variabel IPM memiliki pengaruh signifikan.
- 3) Prob.  $t_{PGR}$  sebesar  $0.4987 \geq 0.05$ ,  $H_0$  diterima maka variabel PGR tidak memiliki pengaruh signifikan.
- 4) Prob.  $T_{BelanjaDaerah}$  sebesar  $0.0001 \leq 0.05$ ,  $H_0$  ditolak maka variabel Belanja Daerah memiliki pengaruh signifikan.

### **4.5.3 Interpretasi R-Squared ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi menunjukkan daya ramal dari model statistik terpilih. Hasil estimasi menunjukkan nilai sebesar 0.985666, artinya 98.57% variasi variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, belanja daerah, dan pengangguran. Sedangkan sisanya 1,43% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model.

## **4.6 Intepretasi Ekonomi**

### **1. Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Miskin**

Berdasarkan hasil estimasi data panel, bahwa produk domestik regional bruto menunjukkan tanda negatif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketidaksignifikannya produk domestik regional bruto dalam mempengaruhi kemiskinan juga dapat dilihat berdasarkan data bahwa peningkatan PDRB di

Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2008-2016 tidak selalu diiringi dengan penurunan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti halnya pertumbuhan produk domestik regional bruto di tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 malah terjadi kenaikan kemiskinan.

Berdasarkan Word Bank bahwa pertumbuhan bukan saja berjalan dengan tingkat yang lebih rendah, melainkan juga menjadi semakin kurang merata. Sehingga jumlah penduduk miskin tidak akan dapat mengurangi secara signifikan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi orang miskin. Ketika pertumbuhan tidak diiringi dengan penurunan yang tajam dalam pemerataannya maka terjadilah ketimpangan, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

## **2. Belanja Daerah dan Jumlah Penduduk Miskin**

Berdasarkan hasil estimasi data panel menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2016. Hal tersebut berarti belanja daerah mempengaruhi jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta karena belanja daerah sudah bisa mengentaskan jumlah penduduk miskin. Hal ini didukung oleh teori Subekan (2016) berpendapat bahwa pengeluaran daerah atau belanja pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu system perlindungan social modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Selain itu, pengeluaran atau belanja pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan. Salah satu cara agar pengeluaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan tersebut efektif dengan cara meningkatkan persinya. Meningkatnya porsi pengeluaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan diharapkan dampaknya dapat lebih cepat dirasakan.

### **3. Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk Miskin**

Berdasarkan hasil estimasi data panel menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negative dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2016 dengan koefisien -1.614864. Artinya, semakin tinggi nilai dari IPM, maka semakin berkurang jumlah penduduk miskin begitupun sebaliknya. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sussy (2013) yang berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel”. Memperoleh hasil bahwa IPM berpengaruh negative dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan besarnya koefisien -11.97569. Yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur

dan hidup sehat, untuk mendapatkan pengetahuan dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Hal ini didukung dengan teori Todaro (2004), yang berpendapat bahwa ketika nilai IPM tinggi berarti kualitas sumber daya manusia di suatu daerah baik, sehingga masyarakat yang berada di dalamnya memiliki produktivitas yang tinggi. Produktivitas yang tinggi akan memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat yang kemudian menjauhkannya dari kemiskinan. Pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia mempunyai peranan penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

#### **4. Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin**

Berdasarkan hasil estimasi data panel menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2016. Hal tersebut artinya, setiap kenaikan jumlah pengangguran tidak banyak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa semakin meningkat pengangguran, maka kemiskinan semakin menurun. Nilai koefisien tingkat pengangguran sebesar  $-0.075269$  memiliki arti bahwa setiap kenaikan pengangguran 1 persen dapat menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar  $0.075269$  persen dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena pengangguran didominasi oleh pengangguran yang terdidik, ketika



mereka menjadi pengangguran tetapi tetap mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik dikarenakan biaya hidup masih tergantung kepada orang tuanya atau keluarganya. Pada tahun 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah pengangguran terdidik yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, sebanyak 74,13% adalah pengangguran terbuka dengan tingkat pendidikan tamat Sarjana dan Diploma (BPS 2016). Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh negatif pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin juga dapat dilihat berdasarkan data pengangguran terbuka di setiap Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2016 yang menunjukkan angka pengangguran terbuka yang mengalami fluktuasi yang signifikan, sedangkan data kemiskinan tahun 2008-2016 malah mengalami penurunan. Selain itu, bahwa tidak semua orang menganggur itu selalu miskin, karena kelompok pengangguran terbuka sebagian diantaranya ada yang masuk dalam sektor informal dan ada juga yang mempunyai usaha sendiri, serta ada juga yang mempunyai pekerjaan dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. DIY jumlah angkatan kerja tahun 2016 sebesar 1.971.463 jiwa. Sedangkan pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja sebesar 4,10 persen atau 80.245 jiwa, terserap ke sektor informal dan ada juga yang mencari kerja diluar kota serta ada juga yang berusaha atau mempersiapkan usaha sendiri, sedang menunggu mulainya bekerja, bekerja paruh waktu (*part time*) namun dengan penghasilan melebihi orang yang bekerja secara formal dan semua golongan

tersebut masuk dalam kategori pengangguran terbuka. Kemiskinan mungkin tidak selalu berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan (Goldfrey, 1993). Selain itu juga diperkuat dengan pendapat Lincoln Arsyad (1997) yang menyatakan bahwa salah jika beranggapan setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil estimasi yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan estimasi data panel maka terpilih model yang terbaik yaitu *Fixed Effect Model (FEM)*.

1. Berdasarkan uji kebaikan model variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta karena tingginya pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan menurunnya jumlah penduduk miskin. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemerataan terhadap distribusi pertumbuhan ekonomi.
2. Belanja Daerah berpengaruh terhadap penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berarti bahwa sasaran alokasi belanja daerah untuk orang miskin sudah tepat.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berarti bahwa semakin tingginya kualitas pembangunan manusia maka akan mengurangi jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pengangguran tidak berpengaruh terhadap penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta karena pengangguran disini didominasi oleh

pengangguran terdidik sehingga mereka yang menganggur tidak semuanya miskin

## **5.2 Saran**

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Usaha pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan bisa dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. Diharapkan lebih banyak lagi melakukan perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industry-industri baru yang bersifat padat karya serta menggalakkan pengembangan sector informal seperti home industry. Karena pengangguran dalam penelitian ini menggunakan data pengangguran terbuka, yang mana didalamnya terdapat golongan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan dan sedang dalam tahap menyiapkan usaha atau mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja yang dimasukkan dalam golongan pengangguran. Sehingga pentingnya perluasan kesempatan kerja yang bersifat padat karya dan peningkatan sector informal untuk menekan kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kualitas pembangunan manusia hendaknya lebih ditingkatkan dengan melakukan keterampilan-keterampilan sehingga penduduk memiliki bekal untuk kedepannya.

3. Bagi pemerintah, usaha pengalokasian belanja daerah untuk kemiskinan sudah tepat sasaran. Untuk itu maka harus tetap dilakukan karena akan mengurangi penduduk miskin dengan maksimal
4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lebih lanjut baik dengan cara mengembangkan variabel maupun analisis demi sempurnanya hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Abdul, K. 2017. “Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015”, Naskah Publikasi Penelitian. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surakarta.
- Cholili, Mufid dan Pudjihardjo. (2014). *Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia)*, Naskah Publikasi Penelitian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Gujarati, Damodar. 2009. *Econometric*. Singapura: Mc. Graw Hill Inc.
- Insukindro, 2001. *Modul Pelatihan Ekonometrika Dasar*. Yogyakarta: PAU UGM.
- Kuncoro. (2010). *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Leasiwal, Teddy C. (2013). *Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku*. *Jurnal Citra Ekonomika*. Volume VII, No. 2.
- Nasir, M. Muh, Saichudin, & Maulizar. (2008). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 5 No. 4
- Puspita, Dita W. (2015). “Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.8, No.1. Hal. 100-107.

- Prastyo, Adit Agus. 2010. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Suryawati, C. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. JMPK. Vol. 08/No.03.
- Todaro, Michael P., & Stephen, C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Widarjono, Agus. (2007). “Ekonometrika Pengantar dan aplikasinya”. Yogyakarta: Ekonisia FE UII.
- Yudha, Okta Ryan Pranata. (2013). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Zamhari, Junaidi, Darsono W, & Sanggar . (2015). “Analisis Determinan Kemiskinan di Jawa Timur”. Wacana. Vol. 18. No. 1.